



KR-Chandra AN

Mushaf (Al Quran) Akbar (Besar) karya Drs Hayat dari Universitas Sains Al Quran (Unsiq) Wonosobo masih menjadi daya tarik bagi pengunjung Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Semarang. Banyak jamaah salat memperhatikan koleksi Al Quran unik ini yang diserahkan ke MAJT sejak 26 Oktober 2006 ini. Untuk menjaga agar tidak rusak, pengelola menempatkan dalam etalase kaca di pintu utama ruang salat.

DIKEMBALIKAN KE PEMKOT SALATIGA Sisa Biaya Pemilu Rp 1,8 Miliar

SALATIGA (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Salatiga menyerahkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) hibah penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 senilai 1.8 miliar. SILPA ini diserahkan oleh Ketua KPU Salatiga dan Ketua Bawaslu, Jayusman Junus kepada Walikota Salatiga Robby Herrnawan, Rabu (26/3).

Kepala Bakesbangpol Salatiga, Valentino, melaporkan bahwa Pemerintah Kota Salatiga berkewajiban memberikan hibah dana untuk penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan Bawaslu dengan total Rp 13 miliar yang diberikan dalam 2 tahap. Dana tersebut diberikan untuk fasilitas penyelenggaraan pemilu sehingga terlaksana pemilu yang sukses dan kondusif.

Dalam pelaksanaannya, dana tersebut digunakan secara efisien dan menyisakan SILPA sebesar Rp.1.841.162.514, dan dikembalikan ke kas daerah dengan rincian SILPA KPU sebesar Rp.1.172.519.165 dan SILPA Bawaslu sebesar Rp.668.643.349.

Penyerahan ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima SILPA kegiatan dari KPU dan Bawaslu kepada Pemerintah Kota Salatiga. Walikota Salatiga Robby Hernawan mengapresiasi KPU dan Bawaslu yang telah bekerja keras dalam melaksanakan pemilu yang kondusif.

"Apresiasi kepada KPU dan Bawaslu yang telah melaksanakan pemilu yang aman, tertib, dan kondusif. Semoga dana yang dikembalikan ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan khususnya dalam melaksanakan program unggulan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat," kata Robby.

Walikota Salatiga menyatakan kesiapan untuk mengusahakan terkait kebutuhan Kantor Bawaslu. Diketahui bersama saat ini Bawaslu berkantor di Bangunan dengan sistem kontrak, Bawaslu berharap Pemerintah Kota Salatiga dapat memfasilitasi Bawaslu berupa sarana prasarana gedung kantor.

(Sus)-f

PEMKAB BOYOLALI KIRIM 9 BUS Jemput Pemudik di Jabodetabek



KR - Mulyawan

Wakil Bupati Boyolali, Dwi Fajar Nirwana memberangkatkan bus penjemput pemudik asal Boyolali.

BOYOLALI (KR) - Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali memfasilitasi masyarakat Boyolali yang berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) untuk pulang kampung. Melalui program Mudik Lebaran Gratis Tahun 2025, Pemkab Boyolali memberangkatkan sembilan armada bus menuju Jakarta.

Wakil Bupati (Wabup) Boyolali, Dwi Fajar Nirwana melepas secara langsung dan memberangkatkan sembilan armada bus pada Selasa (25/3) di halaman Kantor Bupati Boyolali. Ini sebagai bentuk perhatian kita kepada keluarga (Boyolali) yang ada di Jakarta. Semoga dari kru, bus dan penumpang diberikan kesehatan, lancar sampai di rumah masing masing. Dan kita yang di Boyolali siap menyambut keluarga kita yang dari Jakarta, ujanya.

Bus-bus tersebut direncanakan tiba di Jakarta pada keesokan harinya di Museum Purna Bhakti Pertiwi, TMII tempat berkumpul para pemudik yang kemudian akan membawa mereka pulang ke Kota Susu. Diperkirakan bus akan sampai di Kabupaten Boyolali Kamis (27/03/2025) dini hari.

Pada program Mudik Lebaran Gratis Tahun 2025, Pemkab Boyolali menyediakan sebanyak lima bus, serta empat bus dari Paguyuban Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Boyolali, dengan total ada sembilan bus. Setiap bus akan diisi sekitar 50 peserta mudik gratis, sehingga daya tampung bus mudik gratis sebanyak 450 orang.

Sebagai tambahan informasi, masyarakat yang mengikuti program mudik gratis ini telah mendaftar ke koordinator wilayah (Korwil) paguyuban perantauan Boyolali di Jabodetabek. Sehingga peserta mudik gratis dapat berkomunikasi dan cepat mendapat informasi terkait program mudik gratis.

(Mul)-f

KAPOLDA JATENG CEK POSPAM DI BANYUMAS

Arus Mudik Naik 30 Persen

BANYUMAS (KR) - Arus mudik di wilayah Jawa Tengah mulai menunjukkan peningkatan sekitar 30 persen. Namun arus lalu lintas masih terpantau lancar, meskipun terjadi kenaikan volume kendaraan sekitar 30 persen. Hal itu dikatakan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo, Rabu (26/3), saat mengecek kesiapan pengamanan mudik di Pos Pengamanan (Pospam) Lebaran di Alun-alun Purwokerto, Banyumas.

Ia menjelaskan mayoritas pemudik dari Jakarta yang menuju Banyumas dan sekitarnya memilih jalur tengah dan selatan dengan kendaraan roda dua, sedangkan kendaraan roda empat lebih banyak melintas di jalur Pantura. "Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan serta stakeholder terkait untuk memastikan kelancaran arus mudik. Jika diperlukan, rekayasa lalu lintas seperti one way atau kontra flow akan diterapkan, terutama di daerah yang mengalami kepadatan tinggi, seperti Wangon saat arus balik nanti," tambah Kapolda.

Selain memastikan kelancaran lalu lintas, kepolisian juga memberikan layanan hospitality bagi pemudik agar perjalanan

terasa aman dan nyaman. "Kami mengusung tagline Mudik Aman, Keluarga Nyaman untuk memastikan pemudik bisa sam-

pai ke tujuan dengan selamat," tambahnya.

Kapolda juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang membantu

mengurangi kepadatan lalu lintas, seperti diskon tarif tol, kebijakan Work From Anywhere (WFA), serta libur sekolah lebih awal. Ia berharap kebijakan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat agar arus mudik lebih merata dan tidak terfokus pada satu waktu tertentu.

Saat ini, lanjut Kapolda, pihak kepolisian ma-

sih terus memantau jumlah kendaraan dengan sistem traffic accounting di beberapa titik, seperti Pejagan dan Ajibarang, guna memastikan kesiapan layanan bagi pemudik. "Kami siap melayani masyarakat yang akan merayakan Lebaran, semoga perjalanan mudik tahun ini berjalan lancar dan selamat sampai tujuan," tegas Kapolda. (Dri)-f



KR-Driyanto

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo saat mengecek Pospam Lebaran Alun-alun Purwokerto.

SIAP LAYANI PEMUDIK URUS ADMINDUK

Musim Libur Lebaran Kantor Tetap Buka

MAGELANG (KR) - Di musim libur Lebaran, tidak menutup kemungkinan ada pemudik yang memanfaatkan waktu tersebut untuk mengurus administrasi kependudukan (Adminduk). Berkaitan dengan hal itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Magelang berusaha untuk dapat melayani.

"Kita Tanggal 28 Maret 2025 masih buka pelayanan," kata Kepala Disdukcapil Kabupaten Magelang R Anta Murpuji Antaka saat ditemui KR sebelum mengikuti rapat paripurna di DPRD Kabupaten Magelang, Selasa (25/3).

Selin itu, Kamis dan Jumat tanggal 3 dan 4 April 2025 mendatang Kantor Disdukcapil Kabupaten Magelang juga sudah buka. "Tanggal 3 dan 4 April sebetulnya masih merupakan hari libur, tetapi kita sudah buka," tambahnya.

Menurut Anta, hal ini untuk melayani pemudik warga Kabupaten Magelang yang ingin mengurus Kartu Keluarga (KK), KTP maupun adminduk lainnya. Meskipun belum pulang atau mudik ke Magelang, sudah ada yang memberitahu akan meng-

urus surat-surat kepindahan dari Jakarta pindah ke Magelang.

Dibenarkan, beberapa waktu lalu diluncurkan inovasi pelayanan adminduk di tingkat kecamatan yang diberi nama "Sahabat Anyar Gress". Untuk sementara ini baru ada di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Candimulyo, Srumbung, Windusari dan Kecamatan Grabag.

Meskipun demikian, belum diketahui secara pasti apakah pada musim libur Lebaran mendatang di 4 kecamatan juga akan dapat memberikan pelayanan bagi para pemudik yang ada mengurus adminduk. Karena itu untuk pelayanan pengurusan adminduk nantinya dilaksanakan di Kantor Disdukcapil Kabupaten Magelang yang ada di tengah Kota Magelang.

Ketua DPRD Kabupaten Magelang Sakir SSos menambahkan, dinas teknis harus merespon, artinya harus siap melayani adminduk bagi warga pemudik, baik itu urusan kepindahan, masuk ke Magelang maupun lainnya. Itu merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan arahan Bupati Magelang tentang birokrasi

yang responsif, artinya harus siap melayani kepada warga yang membutuhkan administrasi kependudukan di Kabupaten Magelang.

Sementara itu rapat paripurna DPRD Kabupaten Magelang, diisi dengan agenda penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Masa Sidang 1 Tahun 2025 oleh Bupati Magelang. Di forum ini Bupati Magelang Grengseng Pamuji menyerahkan Raperda tersebut, dan diterima Ketua DPRD Kabupaten Magelang yang didampingi ketiga Wakil Ke-

tua DPRD Kabupaten Magelang. Rapat ini dihadiri Forkopimda Kabupaten Magelang, Kepala OPD, Pimpinan BUMD, anggota DPRD Kabupaten Magelang maupun lainnya.

Raperda tersebut meliputi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Rancangan Pera-

turan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. (Tha)-f



KR-Thoha

Bupati Magelang saat menyerahkan raperda Masa Sidang 1 Tahun 2025, dan diterima Ketua DPRD Kabupaten Magelang.

PEMPROV JATENG

Hapus Tunggakan Pajak dan Denda Kendaraan

SEMARANG (KR) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memberikan keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk warganya, dengan menghapus tunggakan nilai pokok pajak beserta denda yang berlaku. Penghapusan tunggakan pajak dan denda berlaku mulai 8 April hingga 30 Juni 2025 mendatang. Program itu menyasar wajib pajak yang belum membayar PKB dalam periode sekian tahun ke belakang. Hal itu dikatakan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kepada wartawan di Semarang Selasa (25/3).

Penghapusan tunggakan pajak dan denda tersebut dituangkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 tahun 2024 tentang pengelolaan piutang daerah. Dari penerapan relaksasi pajak berlandaskan pergub tersebut, diharapkan akan merangsang penyaluran piutang PKB hingga Rp 2,8 triliun.

Untuk mendapatkan keringanan tersebut, masyarakat

bisa mendatangi langsung kantor Samsat terdekat dan kemudian membayar pajak berjalan tahun ini (2025). Dengan membayar pajak untuk tahun 2025 di periode program yang diberlakukan, maka PKB dan denda yang belum

ditunaikan pada tahun-tahun sebelumnya akan dihapuskan.

Luthfi menyatakan, telah melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk sosialisasi program tersebut. Di antaranya dengan kepala daerah, Direktorat

Lalu Lintas Polda Jateng, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng, hingga Jasa Raharja.

Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Jateng, Triadi menambahkan, sebagai bentuk dukungan ke Pemprov Jateng, instansi tersebut menghilangkan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) pada tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Bapenda Jateng Nadi Santoso mengatakan, potensi PKB di Jateng ada sekira 12 juta obyek kendaraan. Dari jumlah tersebut, sekitar 5 juta unit kendaraan belum dibayarkan pajaknya. "Capaian pendapatan PKB triwulan pertama 2025, sudah mencapai 20 persen," kata dia.

Pihaknya terus mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat untuk membayar pajak, salah satunya melalui program relaksasi pembebasan tunggakan dan denda, bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai salah satu mitra pembayaran PKB Pemprov Jateng. (Bdi)-f



KR-Budiono

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat memberikan keterangan kepada wartawan soal penghapusan pajak dan denda kendaraan.